

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

BASMAL DEWANTORO

NIM: 31401405427

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG**

2021

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN 2016-2018**

Disusun Oleh:

BASMAL DEWANTORO

NIM : 31401405427

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 4 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, M.Si
NIK. 211492005

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI
KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2016 - 2018

Disusun Oleh:

Basmal Dewantoro
NIM: 3.14.014.05427

Telah di pertahankan didepan penguji
Pada tanggal 26 Maret 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing




Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, M.Si
NIK. 211492005

Penguji



Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Akt
NIK. 211403011

Digitally signed
- by Rustam Hanafi
Date: 2021.08.12
18:05:07 +07'00'



Dista Amalia Arifah, SE, M.Si, AK, CA
NIK. 211406020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Tanggal 26 Maret 2021

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.St., CSRS
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BASMAL DEWANTORO

NIM : 31401405427

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2016 – 2018” dan diajukan untuk diuji pada tanggal 4 Maret 2021, adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah – olah tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas dibatalkan.

Semarang, 4 Maret 2021

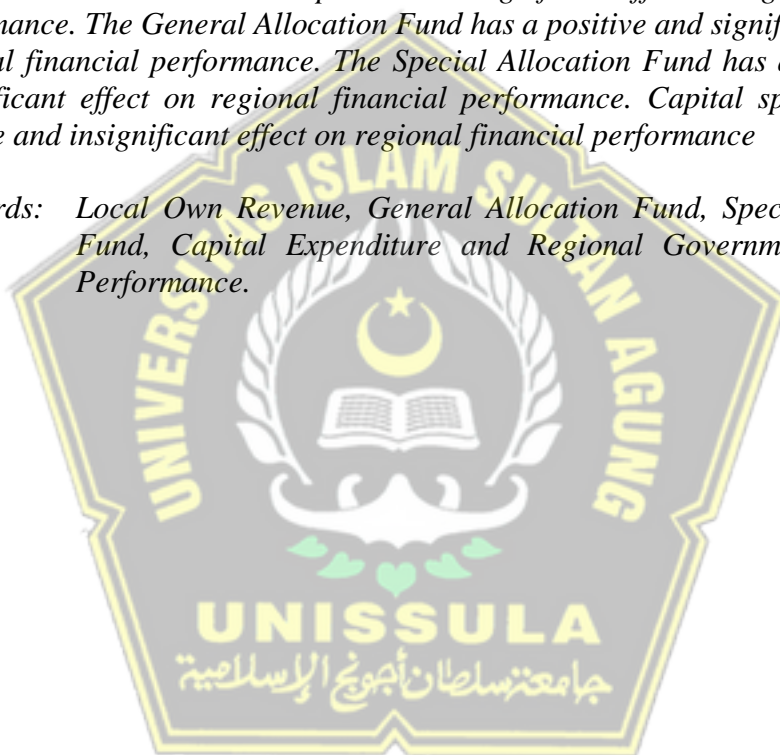


Basmal Dewantoro

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of Local Own Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures on the Financial Performance of the Regional Government of Central Java Province for the 2016-2018 Period. The population in this study were all district / city governments in Central Java from 2016-2018. The sample used in this study was a saturated sampling technique or census, where all members of the population were sampled. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that local revenue has a positive and significant effect on regional financial performance. The General Allocation Fund has a positive and significant effect on regional financial performance. The Special Allocation Fund has a positive and insignificant effect on regional financial performance. Capital spending has a positive and insignificant effect on regional financial performance

Keywords: *Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure and Regional Government Financial Performance.*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sampling jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2016 - 2018” untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan sarjana program Studi Akuntansi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik yang berupa bimbingan, pertimbangan, saran, koreksi maupun masukan-masukan yang berharga demi kesempurnaan penyusunannya. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunissa, SE, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, Msi selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran telah membimbing penulis dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Segenap dosen dan karyawan UNISSULLA Semarang yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini.

5. Keluargaku tercinta Papa dan Mama yang telah banyak berkorban baik yang bersifat materi maupun non materi selama saya di perguruan tinggi hingga akhir skripsi ini selesai.
6. Teman-teman semua, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah khirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Walaupun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, saya berharap dikemudian hari dapat berguna bagi para pembaca serta dapat berfungsi sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan penguasaan ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Maret 2021

Penulis



Basma Dewantoro

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II..... | 10 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 10 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 23 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 26 |

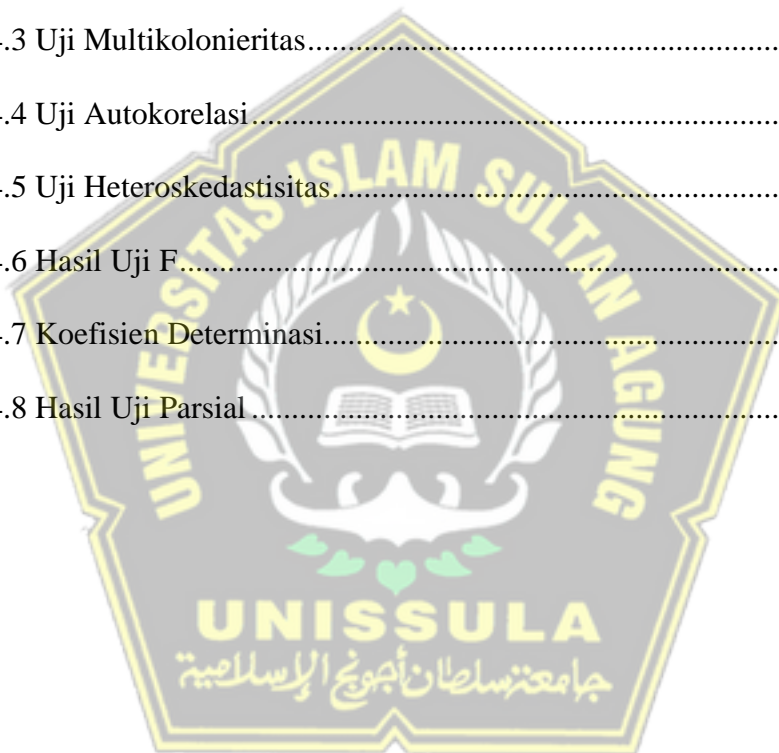
| | | |
|---|---|----|
| 2.4 | Pengembangan Hipotesis..... | 28 |
| BAB III..... | | 34 |
| METODE PENELITIAN..... | | 34 |
| 3.1. | Jenis Penelitian..... | 34 |
| 3.2. | Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 34 |
| 3.3. | Populasi dan Sampel..... | 37 |
| 3.4. | Sumber dan Metode Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.5. | Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV..... | | 44 |
| ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... | | 44 |
| 4.1. | Deskripsi Sampel dan Data..... | 44 |
| 4.2. | Analisis Data..... | 44 |
| 4.3. | Uji Normalitas..... | 47 |
| 4.4. | Uji Asumsi Klasik..... | 47 |
| 4.5. | Pengujian Kelayakan Model..... | 52 |
| 4.6. | Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)..... | 54 |
| 4.7. | Pembahasan..... | 56 |
| BAB V..... | | 62 |
| SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI..... | | 62 |
| 5.1. | Simpulan..... | 62 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 5.2. Keterbatasan Penelitian | 63 |
| 5.3. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 1.1 Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan | 2 |
| Table 1.2 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah..... | 3 |
| Table 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| Table 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian..... | 45 |
| Table 4.2 Hasil Uji Normalitas | 47 |
| Table 4.3 Uji Multikolonieritas..... | 49 |
| Table 4.4 Uji Autokorelasi..... | 50 |
| Table 4.5 Uji Heteroskedastisitas..... | 51 |
| Table 4.6 Hasil Uji F..... | 52 |
| Table 4.7 Koefisien Determinasi..... | 53 |
| Table 4.8 Hasil Uji Parsial..... | 54 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Model Penelitian | 28 |
| Gambar 4.1 Daerah Autokorelasi..... | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran Tabulasi PAD DAU DAK Belanja Modal Kinerja Keuangan Kota / Kabupaten Jawa Tengah Periode 2016 - 2018..... | 69 |
|---|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Walaupun, pemerintah daerah telah memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan namun hal tersebut belum dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, ini membuktikan bahwa masih rendahnya kemandirian pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Tabel 1.1 merupakan perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan pada provinsi di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2014-2018.

**Tabel 1.1 Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Prov. Jawa Tengah
Tahun 2014-2018 (dalam Miliar Rupiah)**

| Tahun | PAD | Dana Perimbangan |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| 2014 | 18.764.753.609.619 | 36.393.953.388.656 |
| 2015 | 20.698.442.504.086 | 37.743.850.669.644 |
| 2016 | 22.747.773.353.248 | 53.202.539.860.574 |
| 2017 | 26.945.325.899.152 | 55.987.747.161.165 |
| 2018 | 26.766.784.398.719 | 56.236.565.457.704 |

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2020

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari provinsi Jawa Tengah memiliki PAD yang tidak melebihi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah seharusnya dalam membiayai urusan rumah tangganya lebih mengandalkan pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut juga dapat menunjukkan kesiapan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu pencapaian hasil di bidang keuangan daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio pertumbuhan dan dinyatakan dalam satuan persentase (Antari dan Sedana, 2018). Berikut adalah kinerja keuangan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

**Tabel 1.2 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018**

| Tahun | Pendapatan | Prosentase |
|-------|--------------------|------------|
| 2014 | 70,820,147,356,093 | |
| 2015 | 80,125,848,250,577 | 13.1399 |
| 2016 | 88,598,301,995,707 | 10.5739 |
| 2017 | 98,308,511,343,368 | 10.9598 |
| 2018 | 99,830,674,145,634 | 1.5484 |

Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah Prov. Jawa Tengah selama tahun 2015-2018. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintahan daerah tersebut mampu untuk

meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015); Jauhar (2016) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Wiguna (2015); Antari dan Sedana (2018) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain PAD dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah (Yanto et al., 2015). Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum (DAU)

merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Wiguna, 2015).

Penelitian Wiguna (2015) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015); Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi

Penelitian Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya.

Mulyani dan Wibowo (2017) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Hal ini berbeda dengan penelitian Jauhar (2016); Antari dan Sedana (2018); Wiguna (2015) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui adanya ketidak konsistenan dari beberapa penelitian terdahulu, dan penelitian ini mengacu pada penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Perbedaan dari penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) yaitu pada penelitian ini menggunakan tambahan variabel yaitu belanja modal, dalam hal ini didukung pada penelitian Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017) bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Alasan Peneliti memilih pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota pemerintahan, dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Maka dalam penelitian ini ingin meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2016-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

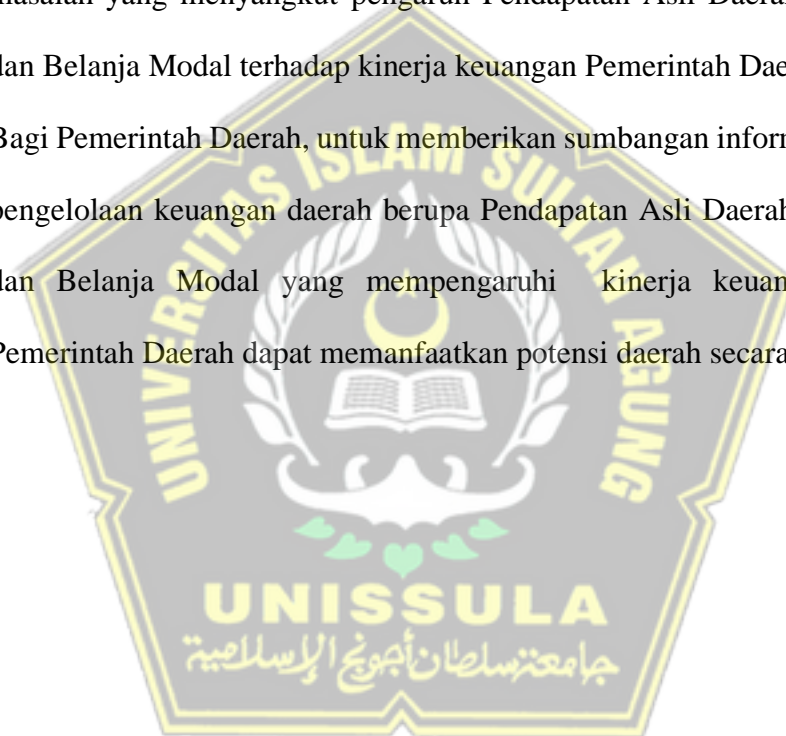
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya

yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pengaruh Pendapatan Asli Daerah DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah, untuk memberikan sumbangan informasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK dan Belanja Modal yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Desentralisasi di Indonesia mulai hangat dibicarakan setelah runtuhnya kekuasaan orde baru. Ini dibuktikan dengan lahirnya dua undang-undang (UU) otonomi daerah yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang- undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Gagasan desentralisasi berawal dari struktur politik yang sentralitas cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintahan pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005).

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy & Solihin (2004), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada

intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.1.2 Teori Agensi

Teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997 dalam Sabeni 2005). Menurut Eisenhard (1989) dalam Sabeni (2005), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen.

Asymmetric Information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang

sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (*asimetri*) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut antara lain adalah :

- A. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- B. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Adanya *agency problem* di atas, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri dari (Jensen dan Meckling, 1976):

- A. *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*
- B. *The bonding expenditures by the agent*. *The bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.

C. *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship.

Halim dan Abdullah (2010) menyatakan berdasarkan UU 22/1999 legislatif memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala daerah. Hal ini bermakna adanya posisi yang tidak setara antara eksekutif dan legislatif, di mana legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Artinya, legislatif mendelegasikan suatu kewenangan kepada kepala daerah yang dipilihnya dengan konsekuensi diberhentikan apabila kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut seperti yang diinginkan oleh legislatif.

Dengan demikian, kemitraan yang dimaksud dalam UU tersebut bukanlah kemitraan yang sepenuhnya sejajar. Dalam literatur ilmiah, baik dalam disiplin ekonomi (termasuk akuntansi), politik, maupun keuangan, hubungan seperti ini disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan.

Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia menurut Halim dan Abdullah (2010) disebutkan juga bahwa pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua

kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja).

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimisasi biaya (input), misalnya dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan modern. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan

apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Disamping tujuan, pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas

jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat

yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Penelitian Adi dan Harianto (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan

desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Adanya dana transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Yani (2002) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas

nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
- b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Dalam mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atas DAK yang dialokasikan dalam mendanai kegiatan daerah digunakan rasio perbandingan antara DAK dengan pendapatan daerah dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat berapa kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk

anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal, seperti Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas yang Berdampak pada Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 mengacu pada beberapa peneliti terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Sampel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Abdullah dan Febriansyah (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan | Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di | Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian |

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Sampel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|--|
| | Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus | Sumatera Bagian Selatan yang berjumlah 58 kabupaten dan kota yang memiliki laporan keuangan yang terbaru yaitu tahun 2011-2013 | Selatan periode 2011-2013 Dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013 |
| 2 | Kusnadi Yudha Wiguna (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah | seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 – 2012 yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota | Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah |
| 3 | Fauzan Jauhar (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/kota se Sumatera Barat | Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Modal | Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang 19 berjumlah kabupaten dan kota | PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap |

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Sampel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|--|
| | | | | kinerja keuangan pemerintah daerah |
| 4 | <p>Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017)</p> <p>Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, <i>Intergovernmental revenue</i> dan PAD terhadap kinerja keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)</p> | <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah</p> <p>Independen: belanja modal, ukuran pemerintah daerah, <i>Intergovernmental revenue</i> dan PAD</p> | <p>Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015</p> | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan intergovern-mental eevenue, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.</p> |
| 5 | <p>Antari dan Sedana (2018)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> | <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah</p> <p>Independen: pendapatan asli daerah, belanja modal</p> | <p>Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali</p> | <p>Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> |
| 6 | <p>Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018)</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan</p> | <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum</p> | <p>Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten</p> | <p>PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. DAK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo</p> |

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Sampel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | Pemerintah Kabupaten Gorontalo | Dan Dana Alokasi Khusus | Gorontalo (2012-2016) | |

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah. Sehingga akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya

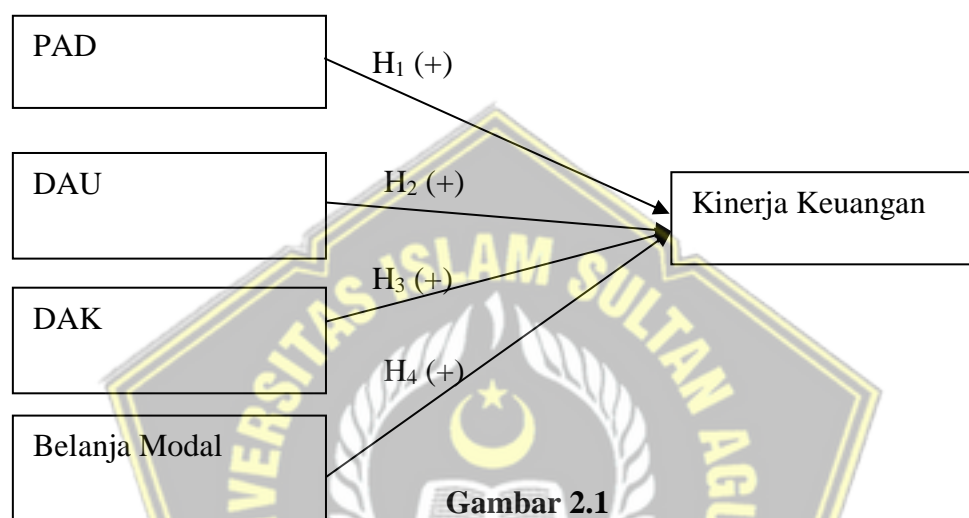
adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33/2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari dana Perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Julitawati, 2012).

Selain itu belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja

daerah akan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan, semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dapat digambarkan dalam model sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No 33/2004 menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pertumbuhan investasi di pemerintah daerah perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Febriansyah (2015); Jauhar (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dan dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002).

Wiguna (2015) menguji pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ada beberapa alasan yang cukup rasional mengapa pemerintah daerah harus mengurangi penerimaan Transfer dari pusat:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Terlalu sering menerima transfer dari pusat justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang efisien.

Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat, sehingga akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

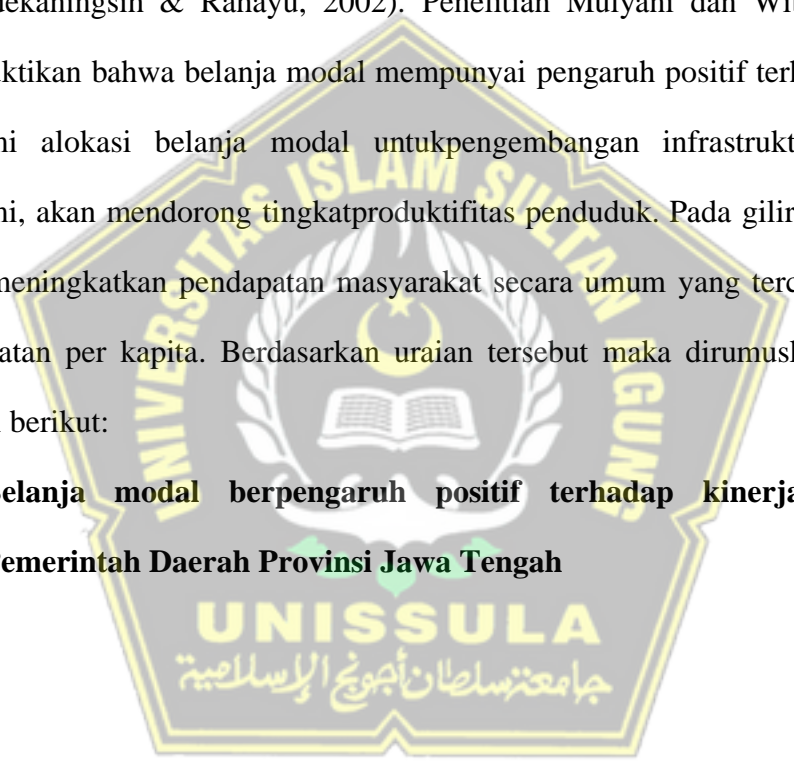
2.4.4. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik,

investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDN/PDRB.

Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, serta menggunakan pengumpulan data dengan instrument penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan kuantitatif ini dianggap sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2012). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian inferensial dimana peneliti melakukan analisis hubungan antar berbagai variable dengan pengujian hipotesis.

3.2. Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2012) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan diatas yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua :

1. Variabel Bebas / Independent (variabel X)

Menurut Sugiyono (2012) pengertian variabel bebas yaitu : “Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).” Dalam hal ini variabel bebas yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Maka pada penelitian ini variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

b. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Dana Alokasi Umum dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2016-2018.

c. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 24 tentang Dana Perimbangan). Variabel ini diukur melalui besarnya dana alokasi umum yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

d. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 belanja modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Variabel ini diukur melalui besarnya target alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran. Belanja modal diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{BM} = \text{Belanja Tanah} + \text{Peralatan dan Mesin} + \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Aset tetap lainnya} + \text{Konstruksi Dalam Pengerjaan} + \text{Aset Lainnya}$$

2. Variabel tidak Bebas / dependent (variabel Y)

Menurut Sugiyono (2012) pengertian variabel terikat yaitu : “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio pertumbuhan yang dinyatakan

dalam persentase. Menurut Halim (2008:241), rasio pertumbuhan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2008:241), rumus rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

3.3. Populasi dan Sampel

Arikunto (2010: 173) berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 119), populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2016-2018.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 120). Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh

kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

3.4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:137).

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2016-2018 dapat diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, jumlah Belanja Modal dan Pendapatan Daerah

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas memiliki residual terdistribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah memiliki nilai distribusi yang terdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

3.5.2. Pengujian Asumsi Klasik

3.5.2.1. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas merupakan situasi dimana terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen. Menurut Ghozali (2011) kriteria terjadinya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya yaitu Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut :

- 1) Jika nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak mempunyai persoalan multikolinieritas sehingga bisa dilakukan ke pengujian selanjutnya.

- 2) Jika nilai *tolerance* di bawah 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka terjadi persoalan multikolonieritas.

3.5.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji *Durbin-Watson* (DW test) (Ghozali, 2011).

Menurut Santoso (2010) dimana pengujian autokorelasi berdasarkan angka Durbin-Watson namun skala yang dipakai tidak perlu membaca tabel DW dan mengetahui angka batas *degree of lower* (dL) dan *degree of upper* (dU) tapi cukup dengan menggunakan angka batas bawah -2 dan batas atas 2. Jika angka DW berada di antara -2 sampai dengan 2, maka data dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi.

3.5.2.3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Glejser sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengalami gangguan heteroskedastisitas

3.5.3. Uji *Goodness of Fit*

3.5.3.1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai *R-Square* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.3.2. Uji F (Uji Model)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka model regresi tidak *fit* (hipotesis ditolak).
2. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka model regresi *fit* (hipotesis diterima).

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti model regresi *fit*.

3.5.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Sugiyono, 2012)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Daerah

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : Dana Alokasi Khusus

X₄ : Belanja Modal

3.5.5. Uji Hipotesis

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Pada skala probabilitas lima persen ($\alpha=5\%$), apabila probabilitas (signifikan) lebih besar dari α (0,05), maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, jika lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : $\beta = 0$, artinya variabel bebas (PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

$H_a: \beta > 0$, artinya variabel bebas (PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Sampel dan Data

Sampel penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Banyaknya sampel penelitian sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-2018 secara *time series* (runtut waktu), sehingga sampel penelitian (n) sebanyak $35 \times 3 = 105$ data. Nama – nama kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada lampiran.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari data tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 105 data pengamatan. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2011: 19). Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian
Deskripsi variabel Penelitian

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| PAD | 105 | 171278000000 | 1821270000000 | 368185647619.05 | 251187425867.655 |
| DAU | 105 | 440041000000 | 1398540000000 | 961952076190.48 | 245086516550.502 |
| DAK | 105 | 56452309000 | 483813000000 | 276388367569.25 | 107363767220.434 |
| BELANJA MODAL | 105 | 113623000000 | 1275360000000 | 408471161904.76 | 188165226045.036 |
| KINERJA | 105 | -4.31 | 22.59 | 6.1141 | 5.53372 |
| Valid N (listwise) | 105 | | | | |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data nilai terendah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 17.127.800.000, sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 1.821.270.000.000 Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-2018 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 368.185.647.619,05 dengan deviasi standar sebesar Rp 94.617,18
2. Berdasarkan data nilai terendah Dana Alokasi Umum sebesar Rp 440.041.000.000, sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 1.398.540.000.000. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-

2018 sebesar Rp 961.952.076.190.48 dengan deviasi standar sebesar Rp 245.086.516.550.502.

3. Berdasarkan data nilai terendah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56.452.309.000, sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 483.813.000.000. Dana Alokasi Khusus kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-2018 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 276.388.367.569.25 dengan deviasi standar sebesar Rp 107.363.767.220.434.
4. Berdasarkan data nilai terendah Belanja Modal sebesar Rp 113.623.000.000, sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 1.275.360.000.000. Nilai rata-rata Belanja Modal kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-2018 sebesar 408.471.161.904.76 dengan deviasi standar sebesar 188.165.226.045.036.
5. Berdasarkan data nilai terendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -4.31, sedangkan data yang paling tinggi sebesar 22.59. Nilai rata-rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2016-2018 sebesar 6.1141 dengan deviasi standar sebesar 5.53372.

4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 110). Pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 105 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 5.48812238 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .065 |
| | Positive | .065 |
| | Negative | -.046 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .670 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .760 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas besarnya nilai signifikan sebesar 0,760, dimana nilai $0,760 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terdistribusi secara normal.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

4.4.1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi, untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011: 108). Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

| Model | Collinearity Statistics | | |
|-------|-------------------------|------|-------|
| | Tolerance | VIF | |
| 1 | PAD | .427 | 2.343 |
| | DAU | .400 | 2.497 |
| | DAK | .455 | 2.198 |
| | BELANJA | .473 | 2.116 |

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* paling tinggi 0,473 dan paling rendah 0,400 sehingga nilai tersebut lebih dari 0,1. Begitupula untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) paling tinggi 2,497 dan paling rendah 2,116, dimana nilai tersebut kurang dari 10. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas karena sudah memenuhi nilai *cutoff* yakni nilai Tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10.

4.4.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2011: 110). Untuk mengetahui ada dan tidaknya autolorelasi harus dilihat nilai uji Durbin-Watson, pada penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

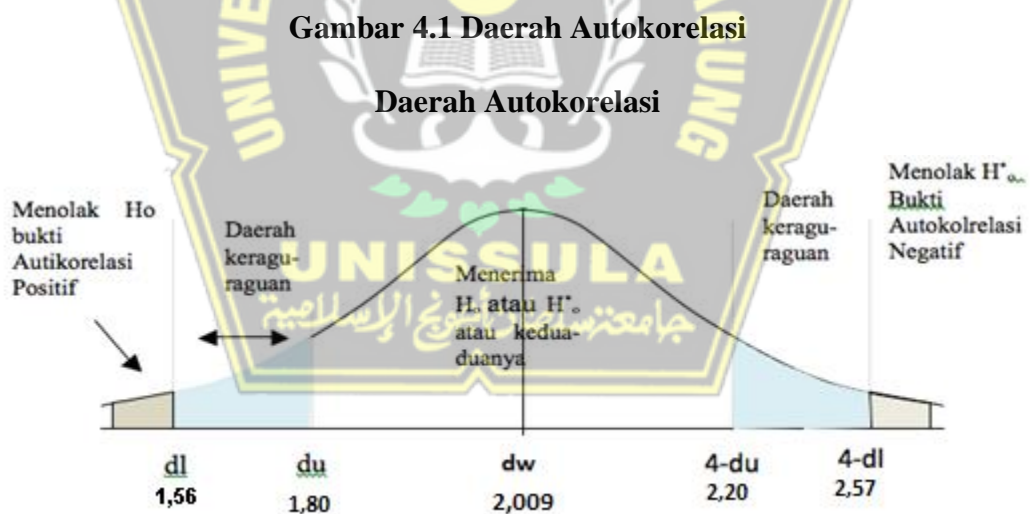
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .978 ^a | .957 | .955 | 81203.58925 | 2.009 |

a. Predictors: (Constant), BELANJA, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang menggunakan Durbin-Watson dengan hasil sebesar 2,009. Dengan jumlah data sebanyak 105 dan variabel independen sebanyak 6 variabel dengan metode uji one – tailed didapatkan nilai $dl = 1,56$ dan $du = 1,80$.



Pada Gambar 4.1 koefisien D-W (2,009) diantara DU (1,80) dan 4-DU (2,20), sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 23453.071 | 18563.971 | | 1.263 | .209 |
| | PAD | .128 | .080 | .228 | 1.597 | .113 |
| | DAU | -.003 | .039 | -.012 | -.078 | .938 |
| | DAK | .234 | .362 | .089 | .647 | .519 |
| | BELANJA | .002 | .002 | .149 | 1.097 | .275 |

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi dari keenam variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (0,113); Dana Alokasi Umum (0,938); Dana Alokasi Khusus (0,519) dan Belanja Modal (0,275). Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5. Pengujian Kelayakan Model

4.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode tahun 2016-2018. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji F
Hasil Uji F
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 | Regression | 1.459E13 | 4 | 3.647E12 | 553.051 | .000 ^a |
| | Residual | 6.594E11 | 100 | 6.594E9 | | |
| | Total | 1.525E13 | 104 | | | |

a. Predictors: (Constant), BELANJA, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan tabel di atas didapat tingkat signifikansi sebesar 0,000; karena memiliki signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel

independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Hasil penelitian dapat diketahui pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .978 ^a | .957 | .955 | 81203.58925 |

a. Predictors: (Constant), BELANJA, DAK, PAD, DAU

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji koefisien determinasi bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R^2 sebesar 0,955. Hal ini berarti bahwa 95,5% variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal sedangkan 4,5% kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lainnya diluar model.

4.6. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik parsial (uji t) digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat. Hasil pengujian analisis regresi dapat diketahui pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial
Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -14934.775 | 29934.233 | | -.499 | .619 |
| | PAD | 1.424 | .129 | .352 | 11.055 | .000 |
| | DAU | 1.443 | .062 | .764 | 23.241 | .000 |
| | DAK | .365 | .583 | .019 | .626 | .533 |
| | BELANJA | .003 | .002 | .037 | 1.217 | .227 |

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber : data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = -14.934,775 + 1,424 \text{ PAD} + 1,443 \text{ DAU} + 0,365 \text{ DAK} + 0,003 \text{ BELANJA} + e$$

Uji Signifikansi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai t hitung variabel Pendapatan Asli Daerah 11,055 lebih dari t tabel 1,66 dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”, diterima.

b. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai t hitung variabel Dana Alokasi Umum 23,241 lebih dari t tabel 1,66 dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”, diterima.

c. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai t hitung variabel Dana Alokasi Khusus 0,626 kurang dari t tabel 1,66 dan nilai signifikan sebesar 0,533 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”, ditolak.

d. Belanja Modal

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai t hitung variabel Belanja Modal 1,217 kurang dari t tabel 1,66 dan nilai signifikan sebesar 0,227 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”, ditolak.

4.7. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil pengolahan data, yang terkait dengan judul, permasalahan, dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami suatu peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No 33/2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pertumbuhan investasi di pemerintah daerah perlu diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli

Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Abdullah dan Febriansyah (2015); Jauhar (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.7.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah meningkat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami suatu peningkatan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan dan dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik, 2002).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Wiguna (2015) yang menguji pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh DAU.

4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 33/2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, maka semakin tinggi DAK maka akan semakin tinggi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bertambahnya kucuran DAK ke daerah setiap tahun semestinya disertai rancangan lebih terarah dan pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan rakyat, sehingga akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini berlawanan yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.4. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDN/BELANJA.

Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Penelitian ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah”, diterima.
- b. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah”, diterima.
- c. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah”, ditolak.
- d. Belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis yang menyatakan “Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah”, ditolak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian –penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Data yang diteliti berkenaan dengan penerimaan daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah baru sebatas Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah dengan periode tahun yang pendek yaitu tahun 2016-2018.
- b. Data Belanja Daerah yang diteliti belum memisahkan antara BTL (eks belanja rutin / belanja aparatur) dan BL (eks belanja pembangunan / pelayanan publik).

5.3. Saran

Dengan adanya keterbatasan tersebut di atas, maka udapat disampaikan beberapa saran baik kepada peneliti berikutnya maupun kepada pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam kajian penerimaan daerah yang akan datang disamping PAD, DAU, DAK dan belanja modal agar memasukkan komponen lain - lain penerimaan daerah yang sah sebagai variabel penelitian karena merupakan komponen pendapatan daerah.
- b. Sebagai manajer keuangan publik, Bupati / Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengetahui dan menguasai dengan baik 4 prinsip - prinsip pokok siklus anggaran yaitu; tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan dan evaluasi.

- c. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL, MAKALAH :

- Abdullah dan Febriansyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1). pp. 41-67. ISSN 2303-0356
- Adi, Priyo Hari dan Harianto David. 2007. “*Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital*”. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Antari dan Sedana, 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110
- Bisma, I Dewa Gde, dan Hery Susanto, 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007*, *Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol. 4, No. 3, Desember 2010.
- Jauhar, Fauzan. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4. No.1
- Julitawati, dkk. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. *Jurnal Akuntansi* ISSN2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Machmud, Joice dan Radjak, Lukfiah Irwan. 2018. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. *Journal Of Accounting Science*. Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501
- Sidik, Machfud. 2002. “*Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*”. Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung
- Wiguna, Kusnadi Yudha. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan*

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Unmura.
Vol. 4 No. 2

Yanto, H, Hasan, H & Sunarto, 2015, ‘ ’, *Jurnal Aquatika*, vol. 6, no.2, hal.11-20

BUKU :

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

Frelistiyani, Winda. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah . 2010 .”*Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan yang diakses tanggal 29 Juli 2010 pada <http://www.bppk.depkeu.go.id/>

Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite’s Perspectivem on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers

- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. North-Holland Publish Company
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyani, Sri dan Wibowo, Hardiyanto. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)*. *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1, Maret 2017
- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Santoso, S. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Scott William R. 2009, *Financial Accounting Theory*, Toronto, Canada : Prentice Hall, Fifth Edition
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo

TESIS & DISERTASI :

- Sabeni, Arifin. (2005). "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan)" Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar

PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang – Undang Dasar RI 1945

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.





LAMPIRAN

**TABEL TABULASI PAD DAU DAK BELANJA MODAL DAN KINERJA KEUANGAN
KOTA / KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN 2016 - 2018**

| No | Kab/Kota | PAD | | | DAU | | | DAK | | | BELANJA MODAL | | | KINERJA KEUANGAN | | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kab. Banjarnegara | 221,048,387,512 | 297,485,382,003 | 235,994,436,137 | 976,642,965,000 | 959,486,489,000 | 959,486,489,000 | 252,046,683,715 | 423,935,262,343 | 364,545,234,875 | 487,535,630,129 | 562,843,385,558 | 474,607,689,278 | 1,693,503,657,927 | 1,836,015,079,137 | 2,168,175,161,490 | 2,074,653,161,695 |
| 2 | Kab. Banyumas | 541,418,386,912 | 619,701,627,380 | 648,326,914,035 | 1,398,539,653,000 | 1,373,971,809,000 | 1,373,971,809,000 | 412,853,809,576 | 449,360,479,699 | 477,533,051,326 | 400,832,864,576 | 472,485,470,290 | 525,416,939,614 | 2,654,284,992,375 | 2,852,968,390,191 | 3,221,258,052,894 | 3,265,926,651,861 |
| 3 | Kab. Batang | 209,957,559,449 | 219,807,128,307 | 237,547,973,048 | 790,848,003,000 | 779,010,049,000 | 781,383,387,000 | 203,972,546,139 | 180,074,001,260 | 231,124,509,384 | 223,872,059,440 | 163,667,905,285 | 163,400,979,708 | 1,396,266,245,121 | 1,498,614,094,093 | 1,566,154,720,814 | 1,701,877,299,154 |
| 4 | Kab. Bora | 171,277,522,706 | 280,042,019,102 | 203,182,795,054 | 943,325,498,000 | 926,754,302,000 | 926,682,649,031 | 277,435,119,000 | 308,447,948,315 | 333,004,046,384 | 434,953,823,988 | 420,864,556,022 | 499,439,779,133 | 1,648,791,900,900 | 1,858,187,916,237 | 2,013,829,444,230 | 2,120,671,434,967 |
| 5 | Kab. Boyolali | 292,310,032,226 | 388,014,897,386 | 342,957,213,726 | 1,032,744,010,000 | 1,014,602,019,000 | 1,014,602,019,000 | 279,575,054,900 | 294,632,409,920 | 381,026,305,696 | 373,915,606,382 | 420,149,743,344 | 498,972,083,904 | 1,937,150,203,967 | 1,993,495,112,162 | 2,176,496,270,254 | 2,227,780,710,062 |
| 6 | Kab. Brebes | 339,156,063,168 | 523,660,773,732 | 346,907,972,510 | 1,339,381,605,000 | 1,317,061,804,000 | 1,321,798,057,000 | 361,801,358,000 | 400,887,743,562 | 398,599,759,143 | 784,627,878,376 | 593,490,572,795 | 527,158,454,521 | 2,417,210,235,716 | 2,572,334,594,629 | 2,856,934,060,544 | 2,854,043,939,110 |
| 7 | Kab. Cilacap | 428,598,349,897 | 648,091,381,096 | 527,577,740,281 | 1,384,695,514,000 | 1,360,370,867,000 | 1,362,443,518,000 | 483,813,446,054 | 440,533,135,033 | 443,618,853,481 | 843,986,253,460 | 650,976,458,792 | 550,840,750,506 | 2,737,224,737,990 | 2,796,010,344,654 | 3,067,274,791,140 | 3,072,112,464,787 |
| 8 | Kab. Demak | 287,457,500,571 | 309,612,407,201 | 342,324,870,245 | 908,643,744,000 | 892,681,795,000 | 894,376,873,000 | 306,941,212,573 | 293,012,350,756 | 275,348,403,392 | 635,402,747,952 | 457,258,575,949 | 414,681,322,203 | 1,786,987,656,752 | 1,952,459,922,200 | 2,060,864,280,423 | 2,143,306,258,595 |
| 9 | Kab. Grobogan | 299,211,316,168 | 440,456,238,668 | 315,743,175,974 | 1,110,337,027,000 | 1,091,590,533,000 | 1,094,460,434,000 | 322,988,008,150 | 383,277,149,862 | 385,401,361,674 | 494,821,083,320 | 603,353,904,468 | 423,425,389,079 | 2,017,588,934,756 | 2,203,275,381,321 | 2,426,674,663,998 | 2,439,501,262,356 |
| 10 | Kab. Jepara | 322,509,753,285 | 325,530,346,533 | 369,330,454,700 | 1,000,373,359,000 | 982,800,016,000 | 984,914,973,687 | 339,310,214,684 | 297,902,571,584 | 314,882,423,372 | 397,078,618,167 | 404,345,727,549 | 397,783,041,502 | 1,930,958,695,918 | 2,106,087,671,994 | 2,165,074,563,873 | 2,255,843,022,157 |
| 11 | Kab. Karanganyar | 301,307,800,956 | 415,142,563,370 | 343,156,469,167 | 996,164,049,000 | 978,664,650,000 | 978,664,650,000 | 352,752,915,080 | 253,371,946,521 | 308,185,919,715 | 382,070,380,920 | 271,970,439,801 | 261,936,024,361 | 1,834,209,380,841 | 2,012,335,065,180 | 2,043,460,305,969 | 2,113,929,231,663 |
| 12 | Kab. Kebumen | 291,016,321,703 | 443,608,862,461 | 352,047,092,282 | 1,256,068,249,000 | 1,234,003,169,000 | 1,234,003,169,000 | 480,415,539,065 | 438,407,835,223 | 390,504,708,527 | 649,703,102,744 | 433,698,055,660 | 370,004,376,524 | 2,326,188,256,641 | 2,606,209,824,034 | 2,713,113,397,677 | 2,639,814,864,398 |
| 13 | Kab. Kendal | 265,074,406,548 | 404,978,613,972 | 335,892,237,024 | 972,952,576,000 | 955,860,928,000 | 956,331,079,388 | 228,131,891,000 | 249,296,332,799 | 295,942,730,376 | 329,821,433,534 | 321,438,759,709 | 284,991,421,170 | 1,720,521,350,832 | 1,888,728,093,841 | 2,047,555,046,096 | 2,138,564,387,700 |
| 14 | Kab. Klaten | 224,197,408,481 | 371,718,439,306 | 395,884,244,135 | 1,204,344,586,098 | 1,271,590,067,902 | 1,237,967,327,000 | 318,994,589,110 | 302,273,202,240 | 373,028,991,537 | 220,759,237,283 | 364,937,481,638 | 384,574,980,960 | 2,177,820,724,857 | 2,258,604,630,605 | 2,581,515,295,917 | 2,577,961,130,135 |
| 15 | Kab. Kudus | 279,239,106,717 | 366,031,203,778 | 337,364,609,424 | 822,153,771,000 | 807,711,173,000 | 807,056,990,772 | 228,303,262,665 | 257,168,272,384 | 239,054,267,051 | 678,205,766,264 | 500,780,772,427 | 377,578,292,200 | 1,755,769,420,301 | 1,880,999,970,784 | 1,983,213,078,247 | 1,996,530,094,357 |
| 16 | Kab. Magelang | 288,485,678,128 | 403,561,238,310 | 325,089,093,092 | 1,078,981,977,000 | 1,060,027,733,000 | 1,060,540,612,000 | 83,510,170,410 | 56,452,309,000 | 301,160,637,595 | 353,167,692,583 | 502,862,222,437 | 501,727,375,261 | 1,945,955,251,171 | 2,036,310,089,428 | 2,271,336,015,858 | 2,302,190,543,616 |
| 17 | Kab. Pati | 314,921,084,791 | 449,821,345,800 | 384,041,846,939 | 1,207,508,997,000 | 1,186,296,947,000 | 1,189,796,870,000 | 327,576,149,212 | 462,940,746,479 | 414,061,984,957 | 419,719,878,687 | 448,942,339,053 | 439,492,642,225 | 2,181,691,961,101 | 2,445,063,689,933 | 2,769,242,943,472 | 2,789,055,859,854 |
| 18 | Kab. Pekalongan | 310,572,581,552 | 305,394,299,061 | 311,288,143,682 | 926,571,243,000 | 910,294,366,000 | 915,154,037,000 | 222,507,471,000 | 342,930,933,787 | 346,840,785,740 | 237,938,808,969 | 336,815,993,533 | 431,412,970,525 | 1,697,594,551,515 | 1,787,351,674,573 | 2,067,907,851,794 | 2,101,449,302,497 |
| 19 | Kab. Pemalang | 275,458,054,016 | 425,893,266,850 | 300,481,887,079 | 1,197,916,501,000 | 1,176,872,960,000 | 1,180,834,332,000 | 270,426,675,208 | 343,530,726,398 | 331,768,131,456 | 246,080,497,261 | 336,088,968,940 | 291,381,937,258 | 1,966,423,490,803 | 2,112,514,280,374 | 2,353,030,274,957 | 2,428,263,885,703 |
| 20 | Kab. Purbalingga | 251,816,668,602 | 355,859,003,583 | 282,679,019,517 | 897,337,823,000 | 881,574,483,000 | 881,574,483,000 | 242,375,709,820 | 329,597,927,647 | 333,565,496,887 | 299,154,094,460 | 400,354,579,758 | 270,527,629,406 | 1,567,587,735,546 | 1,746,235,699,687 | 1,957,994,897,247 | 1,948,442,029,100 |
| 21 | Kab. Purworejo | 255,599,240,424 | 298,606,494,653 | 286,971,590,024 | 940,778,244,000 | 924,251,795,000 | 924,251,795,000 | 339,417,614,546 | 250,875,295,253 | 297,357,422,378 | 274,262,561,414 | 465,126,656,366 | 365,866,406,531 | 1,842,491,063,926 | 2,069,000,842,574 | 2,114,807,792,154 | 2,049,784,186,054 |
| 22 | Kab. Rembang | 234,168,365,751 | 300,319,284,807 | 296,676,436,263 | 785,380,985,000 | 771,584,367,000 | 771,584,367,000 | 107,558,652,000 | 110,696,901,708 | 89,575,324,617 | 345,545,721,301 | 353,770,714,067 | 309,448,505,895 | 1,408,950,534,486 | 1,564,868,839,956 | 1,722,252,909,030 | 1,785,911,075,230 |
| 23 | Kab. Semarang | 318,536,051,176 | 417,417,848,831 | 383,475,678,134 | 968,848,031,000 | 951,828,487,000 | 952,362,147,000 | 310,780,221,524 | 286,621,869,509 | 314,696,838,280 | 381,464,589,453 | 346,459,249,455 | 405,051,441,667 | 1,677,158,224,329 | 1,978,138,017,128 | 2,135,227,865,431 | 2,117,416,566,804 |
| 24 | Kab. Sragen | 297,176,332,577 | 404,569,404,722 | 334,303,284,344 | 1,067,774,278,000 | 1,049,016,918,000 | 1,049,016,918,000 | 333,935,980,704 | 317,898,036,540 | 320,063,100,709 | 325,396,924,022 | 349,519,743,025 | 428,218,853,657 | 2,024,057,424,890 | 2,092,759,142,908 | 2,187,032,686,896 | 2,176,997,511,640 |
| 25 | Kab. Sukoharjo | 363,163,428,162 | 464,567,409,857 | 433,485,481,219 | 959,910,211,435 | 906,416,629,000 | 906,416,629,000 | 287,044,558,458 | 278,332,947,422 | 286,887,271,862 | 327,611,459,445 | 250,940,426,244 | 388,468,318,338 | 1,784,106,364,462 | 1,931,896,575,824 | 2,055,571,033,667 | 2,055,517,964,074 |
| 26 | Kab. Tegal | 316,051,189,734 | 375,531,165,351 | 372,282,676,055 | 1,162,102,111,000 | 1,141,687,714,000 | 1,144,494,182,000 | 290,589,280,933 | 325,623,713,089 | 339,287,872,985 | 516,642,310,814 | 437,758,902,809 | 417,983,021,935 | 2,097,091,623,983 | 2,161,161,059,588 | 2,450,766,552,130 | 2,524,365,919,815 |
| 27 | Kab. Temanggung | 281,328,148,970 | 308,466,748,340 | 252,019,934,778 | 807,995,010,000 | 793,801,136,000 | 793,485,677,000 | 199,009,572,278 | 227,597,740,094 | 225,548,811,404 | 398,487,295,909 | 313,434,852,386 | 185,771,793,520 | 1,469,482,958,105 | 1,678,688,079,170 | 1,779,850,394,321 | 1,731,235,867,161 |
| 28 | Kab. Wonogiri | 218,604,854,595 | 333,840,434,905 | 269,032,427,619 | 1,145,434,277,000 | 1,125,312,680,000 | 1,124,733,467,000 | 289,121,067,975 | 360,636,385,112 | 379,596,211,850 | 404,553,582,240 | 503,215,278,501 | 406,899,652,093 | 1,963,704,538,729 | 2,035,056,535,365 | 2,317,978,656,683 | 2,298,176,600,990 |
| 29 | Kab. Wonosobo | 199,894,767,510 | 228,017,473,938 | 226,819,478,601 | 841,407,175,000 | 826,626,357,000 | 827,791,657,000 | 198,974,002,000 | 267,466,630,022 | 277,386,975,847 | 276,909,650,835 | 311,015,809,922 | 381,600,659,789 | 1,432,159,651,029 | 1,575,601,833,680 | 1,829,290,334,360 | 1,851,441,024,405 |
| 30 | Kota Magelang | 220,315,848,702 | 233,557,714,356 | 249,877,424,347 | 447,909,575,000 | 440,041,244,000 | 440,041,244,000 | 89,394,073,463 | 86,387,994,323 | 105,991,302,809 | 221,924,457,916 | 233,070,956,632 | 237,422,914,193 | 781,335,799,509 | 840,042,626,525 | 909,525,862,920 | 908,089,485,909 |
| 31 | Kota Pekalongan | 178,604,460,870 | 192,002,871,181 | 179,224,408,698 | 457,085,256,000 | 449,055,738,000 | 449,055,738,000 | 109,412,669,154 | 108,994,059,659 | 110,631,025,427 | 201,951,325,331 | 220,686,788,384 | 146,382,593,476 | 809,733,612,473 | 857,642,985,779 | 915,920,377,495 | 905,231,572,568 |
| 32 | Kota Salatiga | 203,768,652,017 | 220,243,361,132 | 208,926,057,032 | 456,079,561,000 | 448,067,710,000 | 448,067,710,000 | 83,698,193,202 | 119,572,187,644 | 88,527,219,754 | 267,294,856,864 | 217,847,988,544 | 222,021,981,988 | 750,581,558,962 | 879,784,189,262 | 882,746,082,111 | 889,992,411,250 |
| 33 | Kota Semarang | 1,491,645,900,065 | 1,791,886,378,674 | 1,821,274,103,250 | 1,211,708,204,000 | 1,190,422,387,000 | 1,190,422,387,000 | 246,886,746,970 | 57,527,145,279 | 79,584,094,202 | 1,026,716,904,816 | 1,275,359,088,966 | 1,228,459,434,270 | 3,347,160,206,438 | 4,103,151,795,483 | 3,964,574,307,584 | 4,234,394,060,362 |
| 34 | Kota Surakarta | 425,502,779,064 | 527,544,224,971 | 527,739,388,159 | 841,536,122,000 | 826,753,038,000 | 826,587,795,000 | 196,726,445,000 | 170,806,131,950 | 216,821,173,609 | 307,534,354,570 | 469,587,240,639 | 523,770,318,153 | 1,568,482,686,616 | 1,703,003,847,995 | 1,803,920,801,908 | 1,879,056,016,679 |